

BAB III

SAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. SAJIAN DATA

1. Peran dan Fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Manajemen Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

Berdasarkan data yang didapat melalui wawancara di bagian Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Peran dan fungsi Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam manajemen isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo adalah:

a. Penyalur dan Pengelola Informasi

Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang merupakan sub bagian dari bagian TI dan Hubungan Masyarakat mempunyai peran dalam hal menyalurkan informasi. Dalam hal ini, humas merupakan pihak yang menyediakan dan menjaga saluran informasi agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Informasi yang disampaikan dapat berupa kebijakan, aktivitas dan hal – hal yang menyangkut dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kebijakan tersebut dapat berupa program yang akan dijalankan oleh pemerintah sehingga masyarakat dapat memahami program tersebut. Salah satu informasi yang disampaikan adalah terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Humas Pemkab Kulon Progo

menyampaikan segala informasi terkait isu tersebut, selain itu humas juga berperan dalam mengelola informasi antara pemerintah dan masyarakat berjalan dua arah. Selain itu, Humas Pemkab Kulon Progo juga membuat rilis dan berita terkait isu pembebasan lahan yang kemudian akan dipublikasikan di media baik itu media surat kabar, televisi, radio maupun web. Seperti yang disebutkan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

“Dalam pembangunan bandara kita berperan sebagai pengelola informasi. Sebagaimana humas lainnya kita berperan sebagai penyalur dan pengelola informasi yang berkaitan dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Kita berperan menjaga agar informasi selalu bersifat dua arah terutama dalam hal menyampaikan kebijakan pemerintah, Terkadang program pemerintah tidak dapat diterima oleh masyarakat untuk itu kita menginformasikan kepada masyarakat secara detail agar masyarakat mengerti maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman kita bekerjasama dengan media massa untuk membantu kita menyebarkan informasi dan publikasi, selain itu kita sampaikan juga melalui berita yang kita muat di halaman website resmi pemerintah Kulon Progo”. Seperti kebijakan pembangunan bandara kita bertugas menyampaikan kepada masyarakat bagaimana bentuk dari kebijakan ini dan tujuannya. Selain itu kita juga membuat rilis dan berita jika dibutuhkan. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017)

Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Humas Pemkab Kulon Progo berperan dalam mengelola dan menyalurkan informasi terkait pembangunan serta pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Selain itu, Humas Pemkab Kulon Progo juga membuat serta mengedit pesan atau berita yang akan disampaikan kepada masyarakat melalui media – media.

b. *Programming*

Dalam hal ini Humas Pemkab Kulon Progo bertugas sebagai perencana program. Humas Pemkab Kulon Progo memiliki program yang direncanakan dan tidak direncanakan. Program yang direncanakan merupakan program yang memang bersifat program kerja dan sudah terjadwal. Sedangkan program yang tidak direncanakan adalah program yang terbentuk ketika terdapat masalah. Dimana humas mengidentifikasi masalah apa yang sedang terjadi dan membuat program untuk mengatasi masalah tersebut. Pembuatan program terkait kapan program tersebut akan dilaksanakan, sasaran dari program tersebut, tujuan serta media apa yang digunakan guna mendukung program tersebut. Jika dibutuhkan humas akan bekerja sama dengan bagian lainnya untuk mengatasi masalah yang terjadi.

Berkembangnya isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo merupakan salah satu yang membuat Humas Pemerintah Kabupaten Kulonprogo membuat program yang tidak direncanakan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Humas Pemkab Kabupaten Kulon Progo:

“Humas Pemkab juga berperan dalam membuat program, kita memiliki program yang memang sudah terjadwal dan program yang terbentuk karena terdapat masalah atau isu yang besar. Biasanya humas juga bekerjasama dengan SKPD atau bagian lainnya jika dibutuhkan. Dalam membuat program kita juga menentukan sasaran dari program yang akan kita lakukan, terutama media yang akan kita gunakan”. Isu yang lagi naik kan masalah

pembangunan dan pembebasan lahan bandara, untuk itu kita buat beberapa program. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa Humas Pemkab memiliki program yang sudah direncanakan dan tidak direncanakan. Salah satu program yang tidak direncanakan adalah program yang berkaitan dengan pengelolaan isu pembebasan bandara lahan Kulon Progo.

1.1 Tugas dan Kegiatan Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam Manajemen Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo.

Berdasarkan data yang didapatkan dari wawancara dan dokumen di Humas Pemkab Kulon Progo. Tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo dalam Manajemen Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo adalah:

a. Pemanfaatan Media Center Sebagai Pusat Informasi

Dalam tugasnya Humas Pemkab Kulon Progo bertugas menjalankan Media Center Kulon Progo. Media Center merupakan unit bagian dari Bagian TI dan Humas yang mana dalam penyelenggaraannya dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo. Segala informasi terkait informasi terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo di pusatkan di media center ini. Media center dimanfaatkan sebagai pusat informasi yang dibutuhkan terkait isu

pembebasan lahan ini. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemkab

Kulon Progo:

“Salah satu tugas kita adalah mengelola media *center* agar tetap berjalan dengan baik, untuk mencari berita atau informasi terkait wartawan bisa langsung mengambilnya di media *center* karena segala informasi kita pusatkan di sini. Dengan adanya media *center* ini kita dapat menjaga hubungan dengan wartawan, selain itu wartawan juga dapat mengirimkan berita secara langsung karena di sini terhubung dengan internet”.(Bu Arning, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017)

Gambar 3.1 : Media Center Kulon Progo



Sumber: PPID Kulon Progo

b. Penyelenggaraan Dialog Publik Terkait Isu Pembebasan Lahan

Selain bertugas mengelola media *center*, Humas Pemkab juga menyelenggarakan dialog dengan masyarakat. Dialog dengan masyarakat ini dilakukan secara tatap muka dan bertujuan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam dialog publik berisikan aduan masyarakat terkait hal yang ingin disampaikan kepada

pemerintah. Dalam kasus ini humas mendengarkan aduan serta keluhan terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Bagaimana keinginan masyarakat terkait program pemerintah tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

“Kita bertugas mendengarkan keluhan masyarakat. Masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan kesahnya biasanya menyampaikannya dalam dialog bersama masyarakat yang kita adakan di kantor humas. Masyarakat yang setuju maupun tidak setuju kita dengarkan keluhan kesahnya, bagaimana keinginannya terhadap kebijakan tersebut supaya kita bisa sampaikan ke pimpinan dan bisa dicari jalan keluarnya”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

Gambar 3.2 : Pelaksanaan dialog publik



Sumber : PPID Kulon Progo

2. Manajemen Isu Pembebasan Lahan Bandara Oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo ini sudah terjadi sejak lama. Pada tanggal 25 Januari 2011 proses pembangunan proyek bandara di Kulon Progo dimulai. terjadi sebuah kesepakatan kerjasama antara

pemerintah Indonesia yang diwakili oleh PT.Angkasa Pura I dengan Investor asal India untuk pembangunan bandara di Kulon Progo. Lalu pada tanggal 13 Mei 2011 ditetapkan Kulon Progo sebagai lokasi pembangunan bandara baru yang akan dibangun di lahan seluas 637 hektare. Hal ini terdengar oleh masyarakat dan banyak mendapat respon yang kurang baik. Terjadi berbagai penolakan oleh masyarakat terutama dari kelompok yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT). Seperti yang di sampaikan oleh Humas Pemkab Kulon Progo:

“Penolakan ini sudah berlangsung sangat lama, bahkan dari tahun 2011. Memang terdapat kelompok yang isinya masyarakat yang kontra terhadap pembangunan bandara. Mereka tergabung dalam kelompok Wahana Tri Tunggal”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

Masyarakat mendengar isu tersebut pertama kali dari mulut ke mulut dan dari berita yang terdapat di media cetak. Masyarakat yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) merupakan masyarakat yang menolak adanya pembangunan bandara. Masyarakat yang tergabung dalam WTT menganggap bahwa proyek pembangunan bandara tidak dikomunikasikan secara jelas dan merugikan masyarakat. Hal ini seperti yang dikatakan oleh ketua WTT:

“Isu mau dibangun sudah terdengar lama, tetapi awalnya masih belum jelas. Kita mendengar dari mulut ke mulut saja sampai akhirnya ada berita di media cetak. Kita tidak setuju, hanya merugikan masyarakat. Kita lebih sejahtera hidup menjadi petani”. (Martono, wawancara dilakukan pada 20 Desember 2016)

Penolakan ini terjadi akibat adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Dimana informasi terkait program

pembangunan bandara tidak didapatkan oleh masyarakat secara utuh.

Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo:

“sebenarnya ini berawal dari informasi yang diterima oleh masyarakat tidak utuh. Sehingga masyarakat yang mendengarnya menjadi panik dan timbul ketegangan dan penolakan. Penolakannya yang akhirnya dimanfaatkan oleh oknum – oknum untuk membuat provokasi dan membuat isu meluas”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat juga disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat untuk menerima perubahan yang terjadi dengan adanya pembangunan bandara ini, terutama dalam hal pembebasan lahan yang biasa mereka gunakan untuk bertani serta tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Ketua Pemuda Glagah :

“mereka belum siap untuk menerima perubahan mba, mereka kaget dan panic takut kehilangan pekerjaan mereka. Mereka takut kebijakan ini tidak membawa keuntungan bagi mereka, di sinikan rata-rata profesinya petani mba”. (Bapak Sarjono, wawancara dilakukan pada tanggal 3 Januari 2017)

Sepanjang tahun 2015 dan 2016 penolakan demi penolakan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat yang setuju dengan pembangunan bandara pun ikut melakukan demo terkait masalah yang berbeda yaitu masalah relokasi lahan yang dijanjikan oleh pemerintah. Pada tanggal 26 Februari 2016 masyarakat melakukan aksi demo terkait relokasi lahan. Menanggapi penolakan yang terjadi Pemkab Kulon Progo merupakan pihak yang harus bertindak untuk menyelesaikannya. Terutama humas berperan dalam pengelolaan isu agar informasi tidak hanya datang dari satu arah tetapi dua arah. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemkab Kulonprogo :

“Ya memang isu yang kita kelola banyak sekali terkait masalah ini, bukan hanya terkait masyarakat yang kontra tetapi masyarakat yang pro juga melakukan demo terkait relokasi. Kemarin demonya itu dilakukan di depan kantor Setda”.(Bu Arning, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017)

Isu – isu terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo ini mulai berkembang melalui berbagai media, baik itu media cetak, web, blog dan media lainnya. Setiap media menceritakan isu tersebut dengan cara mereka sendiri. Terdapat media yang bersifat netral, pro maupun kontra. Hal ini membuat Humas Pemkab harus membuat program agar informasi antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya bersifat satu arah tetapi dua arah. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemkab Kabupaten Kulon Progo:

“Isu yang dituliskan di media memang banyak jenisnya, ada yang bersifat netral, ada yang pro, ada juga yang kontra. Itulah peran kita bermain di sana. Kita harus memberikan informasi juga terkait isu ini agar informasi yang diterima oleh masyarakat tidak hanya bersifat satu arah”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2017)

Dalam mengelola isu terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengidentifikasi isu dengan cara:

a. Melihat Perkembangan Isu

Dalam mengelola isu, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan melihat isu apa yang sedang berkembang di masyarakat. Humas akan melihat bagaimana pengaruh dari isu tersebut. Di tahun 2015 – 2016 Humas Pemkab Kulon Progo melihat bahwa ini merupakan puncak dari isu pembebasan

lahan ini. Karena masyarakat sudah terpecah – pecah. Dimana masyarakat pro dan kontra mengadukan keluh kesahnya. Masyarakat pro mengadukan permasalahan relokasi lahan, sedangkan masyarakat kontra mengajukan penolakan terhadap pembebasan lahan. Walaupun terdapat masyarakat yang kontra, pembangunan bandara tetap dilanjutkan. Hal ini disampaikan oleh Humas Pemkab Kulon Progo:

“2015-2016 memang puncak terjadinya masalah ini, karena masyarakat sudah terbelah – belah menjadi pro dan kontra. Mereka saling beradu argumen. Biasanya yang berdemo kan masyarakat yang menolak, sekarang yang setuju juga menolak tetapi dalam hal yang berbeda. Isu ini sama dengan isu yang lain, kita lihat perkembangannya. Karena tidak semua isu kita buat program”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2016)

b. Membuat Program

Setelah melihat isu yang berkembang, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akan membuat program yang sejalan dengan isu yang berkembang. Hal ini bertujuan agar isu yang berasal dari sumber yang tidak jelas dapat diklarifikasi melalui program yang dibuat oleh Humas Pemkab Kulon Progo. Dalam pembuatan program juga mereka melihat siapa sasaran dari program dan media apa yang akan digunakan.

Dalam kasus pembebasan lahan bandara Kulon Progo Humas Pemkab membuat beberapa program dengan sasaran utamanya adalah masyarakat, sasaran yang terkena dampak

pembangunan bandara karena merekalah yang paling terkena dampak dalam pembangunan bandara, selanjutnya sasarannya adalah masyarakat Yogyakarta karena pembangunan yang akan dijalankan berada di wilayah Yogyakarta sehingga masyarakat Yogyakarta juga perlu mendapatkan informasi terkait pembangunan bandara ini. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

“Setelah melihat isu dan kita pilih isu mana yang perlu kita tanggapi, kita akan buat program. Dalam isu pembebasan lahan kita buat beberapa program yang sasarannya berbeda – beda. Jadi media publikasinya pun berbeda. Sasaran utama pastinya masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara, lalu ya masyarakat Yogyakarta sehingga mereka juga mendapatkan informasi terkait pembangunan bandara ini”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada tanggal 11 Januari 2017)

Menanggapi isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membuat beberapa program di antaranya adalah :

- 1) Kunjungan Bersama Pers ke Lombok International Airport (LIA)
- 2) Talkshow
- 3) Dialog Langsung dengan Bupati

c. Pelaksanaan Program

- 1) Kunjungan Bersama Pers ke Lombok International Airport (LIA)**

Kunjungan bersama pers ini dilakukan bekerja sama dengan PT. Angkasa Pura 1 yang dilakukan pada tanggal 13 April 2016. Dimana Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membawa media pers untuk studi banding ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kunjungan ini diketua oleh Sekda Kabupaten Kulon Progo yaitu Ir. Raden Mas Astungkoro, SH, M.Hum. Kunjungan ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana keadaan Lombok setelah pembangunan bandara baru, baik itu dari segi pariwisata, ekonomi serta pertumbuhan dan perkembangan kota. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara pers dan Pemprov NTB dan bentuk harmonisasi yang terjadi.

Beberapa media yang mengikuti kunjungan bersama Pemkab Kulon Progo diantaranya adalah Sindo, Radar Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Bernas. Kunjungan ini juga diharapkan agar media dapat menghasilkan tulisan yang dapat mengedukasi masyarakat terkait pembangunan bandara. Seperti halnya yang dikatakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo”

“Kita lakukan kunjungan seperti studi banding ke Lombok pada 13 April 2016 bersama rekan media, kita kunjungan ke bandara barunya, kita adakan dialog terkait pariwisata, ekonomi dan pertumbuhan kota dengan adanya bandara ini. Kita harapkan media dapat menuliskan tulisan yang nantinya dapat

mengedukasi masyarakat, karena mereka telah melihat secara langsung, bukan hanya ucapan dari kita saja”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

Gambar 3.3: Kunjungan ke Lombok Bersama Pers



Gambar 3.4



Gambar 3.5



Sumber Humas Pemkab Kulon Progo

Gambar 3.6
Berita terkait Kunjungan Bersama Pers ke Lombok International Airport (LIA)
Koran Jawa Pos



Gambar 3.7
Koran Kedaulatan Rakyat



Gambar 3.8
Koran Kedaulatan Rakyat



Gambar 3.9
Haria Bernas



Gambar 3.10
Koran Sindo



Gambar 3.11
Koran Sindo



Sumber : Humas Pemkab Kulon Progo

2) Talkshow

Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah berkerja sama dengan beberapa media baik itu di daerah Kulon Progo maupun Yogyakarta. Sehingga dalam mengelola isu dan membuat program Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah memiliki media publikasi sendiri. Salah satu program yang telah dimiliki oleh Humas Pemkab Kulon Progo adalah Talkshow. Dalam isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemkab melakukan talkshow di beberapa media yaitu TVRI Jogja, RRI Jogja, Radio Megaswara Sentolo.

Khusus TVRI Jogja dan RRI Jogja dipilih karena memiliki sasaran yang cukup luas terutama untuk rakyat Yogyakarta sehingga dapat mengetahui dan ikut berinteraksi masalah yang terjadi. Sedangkan radio Megaswara Sentolo dipilih karena radio ini berada di Kulon Progo tepat dengan sasaran utama dari informasi adalah masyarakat Kulon Progo khususnya masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara.

Gambar 3.12 : Bupati Kulon Progo sedang memberikan penjelasan terkait dampak pembangunan bandara



Gambar 3.13 : acara talkshow “Kulon Progo Gumregah, Rakyat Sumringah”.



Sumber : www.kulonprogokab.go.id

Kegiatan Talkshow di TVRI Yogyakarta dilakukan melalui program “Kulon Progo Gumregah, Rakyat Sumringah”. Program ini berisikan dialog Bupati dan pejabat yang mengurus pembangunan bandara. Informasi yang disampaikan adalah berupa dampak positif dari pembangunan bandara Kulon Progo. Sedangkan program talkshow radio dilaksanakan dalam program “Bupati Menyapa”.

3) Dialog Langsung Bersama Bupati

Program ini dilaksanakan guna membuat rasa lebih dekat antara pimpinan daerah dengan masyarakat yang dipimpin oleh Bupati Hasto Wardoyo. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015 di pendopo rumah Bupati, 16 Februari 2016 di rumah Bupati dan pada tanggal 18 April 2016 di kantor Bupati. Dialog ini dilakukan bersama masyarakat yang setuju maupun tidak setuju

dengan kebijakan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah.

Masyarakat diberi kesempatan untuk bertemu dan mengadukan keluh kesahnya terkait masalah pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Dalam kegiatan ini, masyarakat disambut langsung oleh Bupati dan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesah serta aspirasi mereka dalam pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo:

“Masyarakat kita beri kesempatan untuk berdialog langsung dengan Bupati. Kalau bertemu dan bapak Bupati yang berbicara secara langsung setidaknya timbul rasa percaya dari masyarakat dan rasa puas”.(Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

Gambar 3.14 : Masyarakat berdialog langsung dengan Bupati Kulon Progo



Gambar 3.15



sumber: Humas Pemkab Kulon Progo

Gambar diatas menunjukkan dialog langsung bersama Bupati dengan masyarakat yang setuju dengan pembebasan lahan. Dalam dialog tersebut masyarakat menyampaikan keluhan kesah serta keinginan mereka terkait masalah relokasi. Dalam dialog tersebut Bupati secara langsung menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat.

Gambar 3.16
Masyarakat berdialog di rumah Bupati Kulon Progo



Sumber: Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
Gambar 3.17

Pemberitaan terkait dialog bersama Bupati.

HarianJogja.com

Print | Tuto

BANDARA KULONPROGO : Dapat Bertemu Bupati, WTT Puas

Kota, 15 Januari 2015 08:44 WIB

Sivitz Sabandar/008HarianJogja

Bandara Kulonprogo, WTT mengaku puas dapat bertatap langsung dengan bupati dan menyampaikan uneg-uneg.

Harianjogja.com, KULONPROGO-Harga Wahana Tri Tunggal (WTT) mengaku puas dapat bertemu dengan Bupati Kulonprogo, sekalipun belum ada titik temu. Pasalnya, agenda pertemuan ini sempat terancam batal karena perdebatan soal teknis tempat pelaksanaan.

Bupati Kulonprogo mengizinkan ratusan warga WTT datang menemuinya di Kota Wates, Rabu (14/1/2015) siang. Pertemuan tatap muka dengan Bupati dilakukan oleh perwakilan warga WTT yang berjumlah sekitar 20 orang di pendopo Rumah Dinas Bupati.

Sementara, ratusan warga lainnya menunggu di jalan depan Rumah Dinas Bupati sembari berorasi dan meneriakkan yel-yel tolak bandara. Dari informasi yang dihimpun Harianjogja.com di lapangan, aksi tersebut juga diikuti oleh mahasiswa yang tergabung dalam Sekolah Bersama (Sekber).

Dalam pertemuan yang berjalan satu jam, perwakilan warga menyampaikan alasan menolak pembangunan bandara di Kecamatan Temon. Tanah pesisir yang dianggap subur oleh masyarakat serta warga yang sudah sejahtera menjadi topik utama aspirasi.

"Tidak perlu berpikir soal besok-besok, yang jelas lihat saja kondisi warga saat ini sudah sejahtera," ujar Wasiyo, salah satu warga WTT.

Sugito, warga lainnya, menekankan, lahan pertanian di Temon subur sehingga tidak layak dikorbankan menjadi lahan pembangunan bandara. Terbukti, kata dia, jika musim kemarau panjang areal pertaniannya tidak pernah kekurangan air.

"Kalau kami digusur, kami sudah tidak bisa apa-apa lagi," ungkapnya.

Sumber www.harianjogja.com

Dialog bersama Bupati juga dilakukan pada tanggal 14 Januari 2015. Dialog antara Bupati dan kelompok masyarakat penolak pembebasan lahan bandara yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) ini ini dilakukan di pendopo kediaman Bupati Kulon Progo Dr. Hasto Wardoyo, SP. OG.(K). Sebelumnya, WTT melakukan aksi demonstrasi di lingkungan kantor Bupati Kulon Progo, untuk menjawab aksi tersebut humas mengatur pertemuan antara WTT dan Bupati untuk melakukan dialog serta negosiasi antara WTT dan Bupati Kulon Progo.

Tabel 3.1 : Program Pengelolaan Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

NO	PROGRAM	SASARAN	TUJUAN	PELAKSANAAN
1	Kunjungan Bersama Pers ke Lombok International Airport (LIA)	Pers	Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan studi banding dengan pemerintah Lombok,	13 April 2015

			<p>yang mana sebelum LIA berdiri juga terjadi penolakan oleh masyarakat Lombok. Pemerintah Kulon Progo juga ingin melihat bagaimana cara pemerintah Lombok dalam menjaga hubungan dengan pers. Setelah kegiatan ini diharapkan pers dapat menghasilkan tulisan yang dapat mengedukasi masyarakat bahwa pembangunan bandara tidak selamanya bersifat negatif dan dapat membawa perubahan yang positif.</p>	
2	Talkshow	Masyarakat Kulon Progo dan Masyarakat Yogyakarta	<p>Talkshow ini dilakukan di radio RRI Yogya dan Megaswara Sentolo dan TVRI Yogya. Tujuan dari diadakannya talkshow ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait masalah pembangunan bandara di Kulon Progo yang mana informasi tersebut berfungsi sebagai penyeimbang isu yang beredar di masyarakat terkait pembangunan dan</p>	<p>TVRI Yogyakarta: “Kulon Progo Gumregah, Rakyat Sumringah” 1 Juni 2016 pukul 16.30 – 18.30 WIB</p>

			pembebasan lahan bandara Kulon Progo	
3	Dialog Bersama Bupati	Masyarakat yang pro atau kontra terhadap pembangunan bandara	Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dalam bentuk obrolan bersama Bupati. Masyarakat langsung menyampaikan keluhan kesah terkait pembangunan dan pembebasan lahan bandara ini. Keluhan kesah yang disampaikan diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh Bupati Kulon Progo	14 Januari 2015 16 Februari 2016 dilakukan di rumah Bupati 18 April 2016 dilakukan di kantor Bupati

d. Evaluasi Program

Setelah menjalankan program, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan evaluasi terkait program tersebut. Evaluasi dilakukan guna melihat apakah program yang dilakukan telah sesuai seperti yang telah direncanakan. Evaluasi dilakukan setelah melaksanakan program untuk

melihat apakah program yang dilakukan telah berjalan dengan lancar.

Dalam program manajemen isu yang dilaksanakan, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan evaluasi secara besar atau per semester. halnya yang dikatakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

“Setelah menjalankan program, kita laksanakan evaluasi setelah program selesai. Evaluasinya tidak besar hanya evaluasi biasa karena ini program untuk mengelola isu. Kalau program yang terjadwal kita lakukan evaluasi per semester”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Isu Pembesian Lahan Bandara Kulon Progo

Dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat, diantaranya adalah :

a. Faktor Pendukung

Dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo beberapa hal yang menjadi faktor pendukungnya adalah:

1) Dukungan Pemerintah Pusat

Pembangunan bandara merupakan program Nasional yang mendapatkan dukungan anggaran yang

mendapat dukungan dari pemerintah pusat sehingga dalam mengelola isu Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo secara tidak langsung juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat sehingga kebijakan pembebasan lahan akan tetap berlangsung. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

“Salah satu faktor pendukungnya adalah program pembangunan bandara ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, sehingga secara langsung kita juga mendapat dukungan baik itu anggaran maupun dukungan untuk terus melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan pembebasan lahan bandara dari pemerintah pusat”.(Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

2) Terdapatnya Masyarakat yang Mendukung Pembangunan Bandara

Selain mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Terdapatnya masyarakat yang mendukung pembangunan bandara menjadi salah satu faktor pendukung. Mereka memiliki kesadaran yang cukup tinggi. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran akan menerima perubahan dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan kebijakan pembebasan lahan sehingga mereka bersedia mendengarkan informasi dari pemerintah dan bersedia untuk di relokasi. Seperti yang

dikatakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon

Progo:

“Selain itu masyarakat yang sudah pro sejak awal juga menjadi faktor pendukung kita. Mereka memiliki kesadaran dalam menerima perubahan mereka bersedia di relokasi dan mendengarkan penjelasan dari pemerintah, hal tersebut membantu kita dalam mengelola isu. Hal tersebut sangat membantu”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo yang dimiliki oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah masih terdapatnya penolakan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandara, sehingga mereka tidak berpartisipasi dalam kebijakan pembebasan lahan dan tidak bersedia untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah sehingga alur informasi antara masyarakat yang menolak dan pemerintah hanya bersifat satu arah. Seperti yang dikatakan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo:

“faktor penghambatnya itu beberapa masyarakat kontra tidak mau mendengarkan informasi yang kita sampaikan, sebenarnya kita tidak menyalahkan informasi yang beredar tetapi kita mengklarifikasi agar informasi tersebut dua arah. Tetapi sebagian masyarakat tidak mau mendengarkan, itu sulitnya”. (Bu Arning, wawancara dilakukan pada 11 Januari 2017)

B. ANALISIS DATA

1. Peran Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Dalam Mengelola Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan dokumentasi, isu pembebasan lahan bandara ini telah sampai pada tahap *Organization (Current Stage and Critical Stage/Limit/Contain the Issue)* dimana dalam tahap *Current Stage* isu berkembang lebih populer karena media massa memberitakannya secara berulang kali. Pada tahun 2015 media massa baik itu surat kabar, media *online*, dan web memberitakan isu pembebasan lahan secara berulang – ulang dan secara update terutama web – web yang kontra terhadap pembangunan. Sedangkan pada *Critical Stage* terjadi pada saat publik mulai terbagi menjadi dua yaitu setuju dan kelompok. Dilihat pada perkembangannya pada tahun 2015 – 2016 masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara telah terbagi dua yaitu masyarakat yang setuju dengan adanya pembangunan bandara dan masyarakat yang menolak pembangunan bandara.

Sedangkan pada tahun 2016 isu ini berada di tahap *Resolution (Dormant/Shape Regulations, Standards & Plans)* dimana pada tahap ini isu telah melewati siklus perkembangannya dan organisasi telah melewatinya meski mengeluarkan energi yang besar, waktu yang lama dan biaya yang besar. Dalam tahap ini pemberitaan mulai berkurang karena adanya solusi dari pemerintah yang membuat perubahan sehingga isu

diasumsikan berakhir. Namun pada tahap ini dimungkinkan isu kembali muncul atau isu baru yang berkaitan dengan isu sebelumnya.

Dilihat dari perkembangannya pada tahun 2016 pemerintah telah menemukan kebijakan guna meredam isu ini, dimana berbagai pendekatan dan program dilakukan. Namun pada tahun ini isu yang berkembang adalah isu yang berkaitan dengan isu sebelumnya yaitu isu terkait relokasi tanah bagi masyarakat yang setuju dengan adanya pembangunan bandara. Hal inilah yang membuat Humas Pemkab Kulon Progo harus melaksanakan perannya secara baik dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo ini.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti, dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan beberapa peran humas. Menurut Cutlip (2006:45-47) secara garis besar humas memiliki 4 peran yaitu teknik komunikasi, *expert Prescriber* (pakar perumus), fasilitator komunikasi, dan fasilitator pemecah masalah. Menurut peneliti berdasarkan hasil wawancara dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakan peran humas yaitu:

- a) Fasilitator Komunikasi, dimana Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berperan sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan terkait isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo.

Selain itu Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga berperan menjaga keseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat tetap bersifat dua arah. Isu – isu yang berkembang di masyarakat baik itu dari surat kabar, berita *online* dan web dapat di klarifikasi oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Informasi yang disediakan terbagi atas sasarannya, seperti informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat disampaikan melalui program talkshow. Selain itu informasi juga dilaksanakan melalui penyelenggaraan dialog bersama publik. Dimana informasi tersebut bersifat negosiasi antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan oleh Bupati dan lebih mengarah kepada penjelasan terkait isu pembebasan lahan bandara. Sedangkan informasi yang akan disampaikan kepada awak media disediakan melalui media *center* agar informasi bersifat terpusat dan melalui program kunjungan pers, yang mana diharapkan media dapat membuat tulisan terkait dampak pembangunan bandara berdasarkan apa yang telah mereka lihat di Lombok International Airport (LIA).

- b) Teknik Komunikasi. Dalam peran ini, Humas Pemkab Kulon Progo membuat, mengedit pesan atau berita yang terkait dengan isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Yang mana nantinya isu tersebut akan disebarluaskan melalui berbagai media seperti Koran, radio dan televisi. Selain itu

humas juga akan membuat tulisan, berita atau rilis berkaitan dengan kebijakan pembebasan lahan bandara yang kemudian akan dipublikasikan oleh PPID di web resmi pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Dalam menjalankan perannya dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo kurang maksimal, karena tidak menjalankan peran sebagai *Expert Prescriber* (pakar perumus) dimana Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak melakukan riset dalam membuat program. Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya mengidentifikasi isu apa yang sedang berkembang di masyarakat, tidak mengkhususkan isu yang berkembang. Selain itu Humas Pemkab Kulon Progo juga tidak melakukan peran sebagai fasilitator pemecah masalah, karena dalam kebijakan pembebasan lahan bandara, humas hanya berperan dalam mengelola isu sedangkan terkait keputusan dalam kebijakan akan diputuskan oleh pemimpin yaitu Bupati Kulon Progo serta departemen lain yang berperan dalam bidangnya.

Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang berperan sebagai pendengar akan mendengarkan dan menyampaikan informasi yang didapatkan dari masyarakat kepada pimpinan pemerintah yang selanjutnya akan diklarifikasi. Untuk menampung semua informasi terkait isu ini Humas Pemkab Kulon Progo memanfaatkan media *center* dan menjalankan program dialog bersama publik. Pemanfaatan media *center*

dan adanya program dialog bersama publik ini sebenarnya bertujuan agar informasi berjalan dua arah, karena sebagai fasilitator komunikasi humas berperan sebagai penyeimbang informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut peneliti, isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo merupakan isu yang menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat Kulon Progo. Seharusnya dalam isu ini Humas Pemkab Kulon Progo memiliki peran yang lebih besar bukan hanya sebagai penyalur informasi dan membuat berita, terutama untuk memberi saran kepada Bupati dalam mengambil keputusan, karena humas yang berperan dalam mendengarkan keinginan serta keluh kesah masyarakat terkait pembebasan lahan bandara ini. Selain itu, humas merupakan perantara antara masyarakat dan pemerintah, seharusnya humas dapat diikutsertakan dalam tim yang lebih khusus untuk menangani pembebasan lahan bandara bukan hanya sebagai pengelola informasi.

Selain menjalankan perannya, Humas Pemkab Kulon Progo juga menjalankan tugasnya sebagai humas pemerintah. Seperti yang dituliskan oleh John D. Millet dalam bukunya *Management in Public Relation Service the Quest for Effective Performance*, humas pemerintah memiliki tugas utama yaitu, *learning About Public Desires and Aspiration, advising the Public About What Is Should Desire, ensuring Satisfactory Contact Between Public and Government Official ,informing and Explaining About What An Agency Is Doing*

Dari empat tugas yang disebutkan oleh John D. Millet dimana Humas Pemkab Kulon Progo melaksanakan tiga dari ke-empat tugas itu, yaitu Humas Pemkab Kulon Progo juga berupaya untuk membentuk dan menjalin sebuah hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara ini (*ensuring satisfactory contact between public and government official*). Membentuk hubungan yang baik di antara masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara dan pemerintah tidaklah mudah, tidak cukup hanya dengan menyampaikan informasi saja. Hal ini harus diwujudkan dengan pendekatan dan tindakan secara nyata agar isu terkait pembebasan lahan tidak berkembang secara pesat lagi. Tindakan – tindakan tersebut diwujudkan melalui program yang dilaksanakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo seperti program dialog bersama Bupati, kunjungan bersama pers ke Lombok International Airport, talkshow dimana melalui program ini Humas bertujuan membentuk rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Humas Pemkab Kulon Progo juga melihat serta menampung aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat terkait kebijakan pembebasan lahan bandara ini (*learning about public desires and aspiration*). Dimana Humas Pemkab Kulon Progo mendengarkan aspirasi masyarakat yang terkena dampak dari pembangunan bandara ini, aspirasi tersebut berupa alasan penolakan, apa yang diinginkan dari masyarakat yang kemudian akan disampaikan berupa informasi dan saran kepada pimpinan untuk

ditindaklanjuti. Di samping melaksanakan tugas tersebut, Humas Pemkab juga melaksanakan tugas untuk memberikan penerangan dan informasi terkait upaya dalam menyelesaikan isu yang berkembang (*informing and explaining about what an agency is doing*).

Humas Pemkab Kulon Progo menyampaikan segala informasi yang wajib disampaikan baik itu terkait pembebasan lahan, relokasi lahan, perkembangan pembangunan bandara dan hal – hal terkait. Humas Pemkab Kulon Progo menyampaikan informasi tersebut melalui surat kabar, radio, televisi dan web resmi pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Dalam menjalankan tugasnya sebagai Humas Pemkab Kulon Progo tidak menjalankan tugas sebagai *advising the public about what is should desire* karena dalam program pembangunan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya berperan dalam mengelola isu. Sehingga terkait saran guna kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pimpinan Kabupaten Kulon Progo dilakukan oleh departemen dan instansi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan bandara ini.

Dalam menjalankan tugasnya Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah melaksanakannya dengan baik, seperti yang dituliskan dalam Ruslan (2003:323) tugas humas pemerintah lebih menekankan dalam pelayanan publik (*Public Services*) demi meningkatkan pelayanan umum. Namun, pendekatan yang dilakukan menurut peneliti masih sangat kurang karena pendekatan yang dilakukan tidak menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara Kulon Progo,

sehingga hubungan yang baik masih belum terbentuk secara sempurna terutama hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang tidak setuju dengan adanya pembebasan lahan bandara. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang menolak untuk ikut andil dalam program-program yang dilakukan oleh pemerintah guna mendukung pembagunan bandara serta masih banyaknya masyarakat yang menolak pembebasan lahan bandara.

2. Pelaksanaan Manajemen Isu Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Dalam isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mempunyai peran untuk mengelola isu tersebut. Dalam penerapan manajemen isu menurut Chase & Jones (1997) terdapat lima tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi Isu
- b. Melakukan Evaluasi dan Analisis Isu – Isu yang ditemukan
- c. Merumuskan Program yang Dapat Dilakukan Organisasinya untuk Merespon Isu Tersebut Termasuk Merumuskan Strategi – strategi Alternatif untuk Mengubah Isu
- d. Pelaksanaan Program
- e. Mengukur (Evaluation) Apakah Program – program Tersebut Berjalan Sesuai Tujuan Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti dapatkan, dalam mengelola isu pembebasan lahan bandara Humas Pemkab Kulon Progo melakukan beberapa hal yaitu:

1) Mengidentifikasi Isu

Menghadapi isu yang beredar di masyarakat, Humas Pemerintah akan melihat isu apa yang berkembang di masyarakat Kulon Progo dan mengidentifikasi bagaimana dampak dari isu tersebut. Isu pembebasan lahan bandara ini sebenarnya telah berlangsung sangat lama dan penanganannya berlangsung cukup lama. Namun dalam menghadapi isu ini, Humas Pemkab Kulon Progo tidak menghususkan pengelolaan isu ini.

Dalam Chase & Jones pada tahun 1997 (dikutip dalam Kriyantono:2015:181) proses mengidentifikasi isu dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah *,polling Opini*, menggelar FGD dengan para pemuka pendapat, *monitoring* berita – berita media, penyediaan kotak opini, *management by walking around*, memonitor dan menjalin relasi melalui dunia maya. Dari ke enam cara untuk mengidentifikasi isu, Humas Pemkab Kulon Progo melakukan dua cara untuk melihat perkembangan isu pembebasan lahan bandara Kulon Progo yaitu dengan

monitoring berita-berita dengan kegiatan mengkliping. Selain itu dilakukan *management by walking around* dengan cara mengobrol dengan masyarakat yang terkena dampak pembangunan bandara.

Menurut peneliti dalam menangani kasus ini dengan dua cara tersebut sangatlah kurang karena isu yang beredar bukan hanya melalui media cetak, tetapi juga media *online* seperti web, blog sehingga dibutuhkan monitoring dan relasi di dunia maya. Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat melakukan cara lain untuk mengidentifikasi isu, yaitu dengan FGD dengan masyarakat dan tokoh masyarakat. Melalui FGD humas dapat mendengarkan pendapat, serta berdiskusi dengan masyarakat secara langsung sehingga humas dapat mengetahui sejauh mana isu ini di masyarakat.

Untuk isu pembebasan lahan bandara, Humas Pemkab Kulon Progo tidak melakukan evaluasi dan analisis isu secara detail seperti melakukan analisis terhadap sumber isu, jenis isu, cakupan geografis, tingkat kepentingan serta jarak terhadap kontrol. Masing – masing isu memiliki kriteria yang berbeda, sehingga apabila analisis terhadap isu tidak dilakukan, dalam pelaksanaannya humas tidak dapat membagi isu berdasarkan prioritasnya. Seperti yang

dituliskan oleh Chase & Jones pada tahun 1997 (dikutip dalam Kriyantono:2015:181) tujuan dari identifikasi isu adalah untuk menempatkan prioritas awal atas berbagai isu yang mulai muncul.

Menurut peneliti, Humas Pemkab Kulon Progo perlu melakukan analisis terhadap isu karena analisis merupakan suatu hal yang penting dalam mengelola isu, karena dengan melakukan analisis Humas lebih dapat memilah isu mana yang harus dihadapi dengan cepat dan bagaimana tindaklanjut yang harus dijalankan. Dalam melakukan analisis dan evaluasi humas akan mengetahui isu sebenarnya, penyebabnya dan dari mana sumbernya, sehingga humas dapat memberi peringat dampak yang ditimbulkan oleh isu pembebasan lahan bandara. Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah:

2) Membuat Program

Dalam membuat program untuk mengelola isu pembebasan lahan bandara. Humas Kulon Progo membuat beberapa program tambahan yang mana sebelumnya program tersebut telah ada. Program yang telah ada

diantaranya adalah Talkshow di TVRI Jogja dan RRI Jogja. Program tambahan yang dibuat guna mengelola isu ini adalah kunjungan bersama pers ke Lombok International Airport (LIA) serta dialog langsung bersama Bupati.

Menurut Harrison, Register & Larkin terdapat tiga strategi yang digunakan dalam pembuatan program yaitu: *adaptive Change Strategy*, *reactive Chage Strategy* and *dynamic Response Strategy*. Jika melihat program yang dibuat, Humas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menggunakan *adaptive change strategy* dimana Humas Pemkab Kulon Progo menggunakan strategi terbuka dan akomodasi untuk perubahan serta menawarkan dialog konstruktif untuk menggapai kompromi. Strategi tersebut dilaksanakan dengan menampung informasi serta aspirasi dari masyarakat guna menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kebijakan pembebasan lahan bandara tersebut.

Dengan menggunakan strategi *adaptive change strategy* Humas Pemkab Kulon Progo memilih strategi yang baik, karena untuk menjelaskan kepada masyarakat terkait pembebasan lahan bandara tidak dapat dilakukan secara cepat. Dalam pembuatan program Humas Pemkab Kulon Progo juga telah memilih media apa yang harus

digunakan agar tepat sasaran, seperti TVRI Jogja dan RRI Jogja digunakan agar masyarakat khususnya Yogyakarta mengetahui informasi terkait pembebasan serta pembangunan bandara, sedangkan Radio Megaswara Sentolo dipilih karena sasaran utama dari informasi adalah masyarakat Kulon Progo yang terkena dampak dari pembangunan dan pembebasan lahan bandara. Untuk pemilihan media surat kabar, Humas Pemkab menggunakan surat kabar lokal dan Nasional.

Dalam pembuatan program, Humas Pemkab Kulon Progo telah baik, namun menurut peneliti perlu diadakan riset atau analisis sebelum membuat program guna mengelola isu ini, karena isu ini merupakan isu yang menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat. Seperti yang dituliskan oleh Chase & Jones pada tahun 1997 (dikutip dalam Kriyantono:2015:181) proses analisis seorang humas diperkuat dengan riset yang bertujuan mengidentifikasi opini – opini pemuka masyarakat atau figur yang berpengaruh di masyarakat terkait isu yang berkembang. Sehingga jika melakukan riset humas memiliki acuan dasar dan sasaran yang tepat dalam pembuatan serta pelaksanaan program.

3) Pelaksanaan Program

Terdapat tiga program yang dilaksanakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo, diantaranya adalah :

- a) Kunjungan Bersama Pers ke Lombok International Airport (LIA)
- b) Talkshow di TVRI Jogja, RRI Jogja dan Radio Megaswara Sentolo.
- c) Dialog langsung berama Bupati Kulon Progo

Dalam kunjungan bersama pers ke Lombok International Airport Humas Pemkab Kulon Progo membawa beberapa media seperti Sindo, Radar Jogja, Kedaulatan Rakyat dan Bernas, yang mana kunjungan ini diharapkan agar media dapat menghasilkan tulisan yang dapat mengedukasi masyarakat Kulon Progo terkait pembangunan bandara. Beberapa surat kabar yang mengikuti kunjungan tersebut seperti Kedaulatan Rakyat, Sindo, Bernas, membuat berita terkait kunjungan tersebut. Berita tersebut berisikan bagaimana hasil dari pembangunan bandara Lombok yang pada awal pembangunannya pun mendapat penolakan dari masyarakat sekitar, selain itu beberapa berita menjelaskan bahwa pembangunan bandara dapat membuat perkembangan ekonomi semakin maju. Namun jika dilihat dari keseluruhan media yang ikut, Radar Jogja tidak membuat

berita terkait kunjungan tersebut. Pemilihan kunjungan bersama pers guna mengelola isu merupakan pemilihan program yang cukup baik. Tetapi, isu terkait pembangunan bandara tidak hanya berasal dari media massa namun juga berasal dari masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan lalu membuat kelompok guna menentang pembangunan.

Menurut peneliti kunjungan ini merupakan program yang cukup baik, namun sasaran program ini seharusnya bukan hanya pers saja, program kunjungan ini dapat dijalankan juga bersama masyarakat yang berpengaruh di daerah yang terkena dampak pembangunan bandara seperti pemuka adat, lurah, ketua RT/RW, dan ketua kelompok lembaga masyarakat. Sehingga dengan keikutsertaannya, para pemuka masyarakat dapat melihat langsung keadaan serta perubahan yang terjadi di Bandara Lombok dan dapat menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat – masyarakat sekitar.

Sedangkan dalam pelaksanaan Talkshow di RRI dan TVRI Yogya serta Radio Megaswara Sentolo dilakukan dengan penyesuaian jadwal dan slot yang ada di radio dan televisi tersebut, tidak dibuatkan waktu khusus untuk isu tersebut. Dalam pemilihan media dengan sasaran yang

berbeda – beda Humas Pemkab telah melakukannya dengan baik, namun kegiatan talkshow ini tidak terjadwalkan dengan baik, seharusnya Humas Pemkab Kulon Progo dapat menjadwalkan talkshow terkait tema pembangunan bandara terutama terkait pembebasan lahan bandara. karena isu pembebasan lahan ini merupakan isu yang menyangkut kepentingan umum yaitu masyarakat sehingga butuh perhatian khusus karena dapat terus berkembang serta telah mencapai tingkat nasional, oleh karena itu dibutuhkan informasi yang cukup untuk menyeimbangkan informasi yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah dialog bersama Bupati Kulon Progo. Kegiatan ini dilakukan agar masyarakat dapat langsung mendengarkan informasi langsung dari pimpinan. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti Humas Pemkab Kulon Progo tidak menjadwalkan pertemuan tersebut, namun tercatat pada tanggal 16 Februari dan 18 April 2016, Bupati melakukan dialog langsung dengan masyarakat yang meminta kejelasan terkait relokasi lahan.

Menurut peneliti dialog langsung ini sangat penting karena masyarakat yang berdialog langsung Bupati akan mendengarkan dan mendapat informasi terkait segala

kebijakan yang menyangkut pembebasan lahan bandara. Dari data yang diperoleh program ini hanya dilakuka 3 kali, seharusnya program ini dapat dilakukan secara terjadwal guna meminimalisir isu yang berkembang. Selain itu dialog ini dapat dilakukan berulang kali karena dengan melakukan dialog langsung seperti ini, pimpinan dapat mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat dan hasil dari dialog tersebut dapat dijadikan acuan dalam mengambil kebijakan dalam program pembebasan lahan bandara. selain itu dengan adanya program ini Bupati dapat bernegosiasi secara langsung dengan masyarakat terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo.

4) Evaluasi Program

Menurut Cutlip, Center, dan Broom, (2006:435) terdapat 2 bentuk evaluasi yang dapat diterapkan yaitu:

- a) Evaluasi Formatif yaitu evaluasi atau penilaian yang digunakan untuk meningkatkan performa atau kinerja program. Biasanya evaluasi ini dilakukan saat masih atau berjalan dengan maksud untuk capaian program sesuai dengan rencana.

b) Evaluasi sumatif yaitu evaluasi diakhir program.

Evaluasi memastikan bahwa program yang dijalankan berhasil atau gagal menurut ukuran tujuan program. Evaluasi ini digunakan untuk menjamin bahwa program tersebut dapat dilakukan ditempat lain.

Dalam melakukan evaluasi program guna mengelola isu, Humas Pemkab Kulon Progo hanya melakukan evaluasi kecil dalam bidang pelaksanaannya saja, evaluasi dilakukan tidak dilakukan secara mendalam. Selain itu juga tidak terdapat indikator dari keberhasilan program tersebut. Humas Pemkab Kulon Progo hanya melakukan evaluasi formatif yang mengukur apakah program tersebut telah berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Namun Humas Pemkab Kulo Progo tidak melakukan evaluasi di akhir program, dimana evaluasi tersebut melihat keberhasilan program dari segi tujuan program (evaluasi sumatif). Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan pun tidak memiliki indikator keberhasilan. Yang mana indikator keberhasilan dapat memperlihatkan apakah program yang dilaksanakan telah berhasil mengurangi isu yang berkembang di masyarakat.

Menurut peneliti evaluasi yang dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo sangatlah kurang. Humas dapat melakukan evaluasi sumatif serta membuat indikator keberhasilan untuk menilai apakah upaya merespon isu berjalan dengan baik, yang mana dengan melakukan evaluasi sumatif Humas Pemkab Kulon Progo dapat melihat apakah ketiga program yang dijalankan untuk mengelola isu ini telah berhasil atau gagal karena program yang dijalankan merupakan program yang berkaitan dengan kepentingan umum yaitu masyarakat, Seperti yang dituliskan oleh Chase & Jones pada tahun 1997 (dikutip dalam Kriyantono:2015:187) proses *Public Relations* adalah proses yang berkesinambungan (*continuing circle process*): “dimulai dan diakhiri oleh riset’.

Masing – masing dari program dapat dievaluasi apakah telah berhasil berdasarkan tujuan sehingga apabila dilakukan evaluasi sumatif dan riset, Humas Pemkab Kulon Progo dapat membuat dan melaksanakan program lain jika program yang telah dijalankan sebelumnya gagal dalam mencapai tujuan.

Jika dilihat secara keseluruhan, dalam praktiknya Humas Pemkab Kulon Progo melakukan *two-way*

symmetrical dimana humas mengupayakan terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Komunikasi dua arah tersebut dilakukan dengan memberikan segala informasi terkait pembebasan lahan bandara kepada masyarakat, Humas Pemkab Kulon Progo juga menampung segala aspirasi serta keluhan masyarakat terkait pembebasan lahan bandara ini. Selain itu terdapat negosiasi yang dilakukan oleh Bupati Kulon Progo yang mengupayakan agar pemerintah dapat menyesuaikan diri terhadap kemauan masyarakat terkait pembebasan lahan bandara Kulon Progo begitu pula sebaliknya, pemerintah mengupayakan agar masyarakat dapat menyesuaikan diri terhadap kebijakan pembebasan lahan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

3. Penggunaan Media Dalam Manajemen Isu Pembebasan Lahan Bandara Kulon Progo

Pengelolaan isu pembebasan lahan yang dilakukan oleh Humas Pemkab Kulon Progo pasti membutuhkan media sebagai sarana komunikasi. Media merupakan sarana yang digunakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo untuk menyebarkan informasi baik itu sebagai

penyeimbang informasi maupun informasi terkait perkembangan pembangunan serta pembebasan lahan bandara Kulon Progo.

Dalam buku Humas Pemerintah (Sari:2012:47) terdapat beberapa media yang dapat digunakan dalam pengelolaan isu, diantaranya adalah:

a) Surat Kabar

Surat kabar merupakan salah satu media yang digunakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo untuk menyampaikan informasi terkait isu tersebut. Surat kabar yang digunakan merupakan surat kabar lokal dan Nasional seperti Kedaulatan Rakyat, Radar Jogja, Bernas Jogja dan Sindo. Seperti dalam program Kunjungan Bersama Pers ke Lombok International Airport setiap pers dari surat kabar yang dibawa akan membuat tulisan yang diterbitkan di masing – masing surat kabar.

b) Siaran Radio

Selain menggunakan surat kabar, siaran radio merupakan salah satu media yang digunakan oleh Humas Pemkab Kulon Progo. Radio yang digunakan adalah Radio Republik Indonesia Yogyakarta (RRI) dan Radio Megaswara Sentolo. Informasi terkait pembebasan lahan bandara disampaikan melalui

program Bupati Menyapa pada hari Jumat pukul 07.30-08.00 WIB. Sasaran dari kedua radio tersebut adalah masyarakat Yogyakarta dan masyarakat Kulon Progo. Informasi disampaikan dalam bentuk program yang telah ada di radio – radio tersebut, seperti “*obrolan bersama Bupati*”.

c) Siaran Televisi

TVRI Jogja merupakan media televisi yang dipilih guna menyampaikan informasi terkait perkembangan pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Informasi yang disampaikan melalui program televisi lokal ini memiliki sasaran yaitu masyarakat Yogyakarta secara luas. Hal ini bertujuan agar masyarakat Yogyakarta tidak hanya masyarakat Kulon Progo bisa mendapatkan informasi terkait perkembangan pembangunan serta pembebasan lahan bandara Kulon Progo. Melalui program “Kulon Progo Gumregah, Rakyat Sumrigah” pada tanggal 1 Juni 2016 pukul 16.30 – 18.30 WIB, Bupati Kulon Progo menyampaikan betapa pentingnya pembangunan bandara Kulon Progo.

Peneliti juga melihat bahwa selain menggunakan ketiga media tersebut, Humas Pemkab Kulon Progo juga menggunakan web sebagai salah satu media penyalur informasi. Web tersebut dikelola oleh PPID Pemkab Kulon Progo. Segala bentuk informasi yang berkaitan dengan program – program terkait pembebasan lahan

bandara Kulon Progo di publikasikan melalui web yang dapat diakses oleh siapapun. Menurut peneliti, penggunaan beberapa media tersebut sudah tepat namun jadwal talkshow yang dilakukan di media radio dan televisi masih sangat kurang karena hanya mengikuti program acara yang telah terdapat di kedua media tersebut. Sedangkan menurut peneliti media televisi merupakan salah satu media yang tepat untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat guna mengelola isu yang berkembang di masyarakat.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam melakukan perannya dalam mengelola isu, Humas Pemkab Kulon Progo menemui faktor pendukung dan penghambat di dalamnya. Faktor pendukung diantaranya adalah dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah Kulon Progo berupa anggaran untuk menjalankan kebijakan pembebasan lahan guna pembangunan bandara. Selain itu, terdapat masyarakat yang mendukung kebijakan pembangunan bandara ini, mereka memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi dalam kebijakan pemerintah yaitu relokasi lahan.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan isu ini adalah masih terdapatnya aksi penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pembebasan lahan bandara. Mereka tidak bersedia mendengarkan informasi yang disampaikan oleh pemerintah sehingga masyarakat tersebut mudah percaya dengan isu - isu yang berkembang di masyarakat sehingga membuat masyarakat tersebut

membuat aksi berupa penolakan terhadap pembebasan lahan. Ketidakinginan masyarakat untuk mendengarkan pemerintah menyebabkan Humas Pemkab Kulon Progo kesulitan untuk menyampaikan informasi. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang menolak melakukan pembebasan lahan guna pembangunan bandara Kulon Progo.